

# Temuan BPK, Pelanggaran Administrasi Merugikan Negara

Pemerintah Tak Gubris Rekomendasi

**Eko Susilo**

Borneo Tribune, *Nanga Pinoh*

Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2009 terhadap kinerja perangkat daerah yang berkenaan dengan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Melawi tahun 2009, ditemukan beberapa pelanggaran administratif dalam LHP BPK.

“Dalam LHP BPK ditemukan pelanggaran administratif yang masih berupa informasi yang pada akhirnya juga akan berdampak pada

kerugian daerah, dengan angka miliaran rupiah,” ungkap Widyarima, Anggota DPRD Melawi.

Lanjut Legislator PKS ini bahwa temuan pelanggaran dalam LHP BPK bukan hanya pada tahun 2009, namun juga terdapat pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Melawi pada tahun-tahun sebelumnya. Hal itu menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Melawi kurang menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi dari BPK terhadap SKPD-SKPD.

“Hal ini dilihat dari penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di SKPD, yang pertang-

gungjawabannya masih banyak yang tidak jelas dan tidak wajar,” terangnya.

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyikapi persoalan yang berkaitan dengan temuan BPK tersebut, kata Widyarima, ke depannya pemerintah harus melakukan penguatan kemampuan aparatur dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangan, sehingga pelanggaran-pelanggaran baik yang berupa pelanggaran administratif dapat diminimalisir. Selain itu juga, evaluasi jangan pernah berhenti dilakukan atau merasa pu-

as, terutama terhadap SKPD-SKPD yang kemampuan aparturnya masih diragukan, serta tempatkan orang-orang secara profesional tanpa memandang siapa-pun, yang penting bertanggung jawab terhadap pekerjaannya.

“Karena dari LHP BPK ditemukan sebanyak 122 kasus yang masih berupa informasi dan pelanggaran administratif pada tahun 2009,” jelasnya.

Dirinya berharap ke depannya pelanggaran-pelanggaran tersebut harus dikurangi, jangan sampai setiap tahun berikutnya malah ber-

tambah. Oleh karena itu, untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran tersebut, dalam penganggaran barang dan jasa harus berpedoman kepada ketentuan yang berlaku, serta lakukan sosialisasi dan pembinaan kepada seluruh SKPD terkait dengan mekanisme penganggaran belanja daerah.

“Sebagai contoh, seperti aset-aset daerah dan bantuan sosial, yang hampir ada di setiap SKPD selalu ditemukan pelanggaran dengan persentase yang berbeda. Hal tersebut harus ditindaklanjuti dan diperbaiki oleh setiap pimpinan SKPD,” pungkasnya. □